

Warga Tangerang Sudah Bisa Bayar Pajak PBB-P2

TANGERANG (IM)- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang telah menyelesaikan percetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk tahun 2024 sehingga masyarakat sudah bisa membayar pajak PBB-P2.

Kepala Bapenda, Kota Tangerang, Kiki Wibhawa di Tangerang, Kamis (1/2) mengatakan, masyarakat yang belum mendapatkan SPPT dari pihak kecamatan maupun kelurahan maka bisa mencetak mandiri secara elektronik melalui aplikasi Tangerang LIVE.

Selain itu masyarakat juga bisa melakukan pembayaran melalui perbankan, kantor pos, teknologi lewat merchant atau e-commerce serta minimarket.

“Sejak 30 Januari 2024 sudah bisa melakukan pembayaran pajak PBB-P2. Masyarakat bisa memanfaatkan kanal pembayaran yang disediakan,” ujarnya.

Kemudian jika masyarakat sudah membayar PBB-P2 namun tetap ada tagihan masuk maka diimbau untuk segera menghubungi layanan bantuan dengan nomor telepon 08213333530.

“Sedangkan untuk mengetahui jenis pelayanan dan persyaratan bisa melalui website pada laman pbb.tangerangkota.go.id,” ujarnya.

Perlu diketahui realisasi PBB-P2 pada tahun 2023 yakni sebesar Rp541.695.007.750 dari target Rp520.000.000.000 atau tercapai 104,17 persen. Sedangkan untuk realisasi BPHTB tahun 2023 mencapai Rp591.927.983.245 dari target Rp655.000.000.000 atau tercapai 90,37 persen.

Sedangkan target PBB-P2 dan BPHTB tahun 2024 sebesar Rp1.310.000.000.000 tercapai. Nilai ini mengalami kenaikan dari target tahun sebelumnya sebesar Rp1.175.000.000.000. ● pp

BPKD Kota Tangerang Luncurkan Aplikasi Pajak Online

TANGERANG (IM)- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang, Banten, meluncurkan aplikasi pajak online, pajakonline.tangerangkota.go.id mulai 1 Februari 2024 dan menutup aplikasi SIMPAD (e-sptpd.tangerangkota.go.id).

Kepala BPKD Kota Tangerang, Tatang Sutisna di Tangerang, Kamis (1/2), mengatakan perubahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seluruh pelayanan dan informasi pajak daerah menggunakan aplikasi pajak online Kota Tangerang. Perubahan akses pelayanan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan informasi

pajak di Kota Tangerang. “Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yang diinginkan bersama,” katanya.

BPKD Kota Tangerang juga memastikan pengalihan akses baru tersebut tidak akan mengurangi kinerja pelayanan. Tidak hanya itu, pengalihan tersebut tidak dilengkapi dengan prosedur yang sulit.

Masyarakat atau wajib pajak yang ingin mengakses pelayanan dapat menggunakan username dan password yang sebelumnya telah terdaftar pada aplikasi SIMPAD (e-sptpd.tangerangkota.go.id).

Tatang juga memastikan perubahan ini untuk seluruh pelayanan pajak daerah seperti pembayaran pajak, pelaporan SPTPD, dan pengajuan SKPD. “Semuanya menggunakan aplikasi pajak online Kota Tangerang,” kata dia. ● pp



REPLIKA NAGA SAMBUT IMLEK DI SURABAYA

Pekerja menyelesaikan pembuatan replika naga di Balai Kota Surabaya, Jatim, Kamis (1/2). Dekorasi replika naga berukuran panjang 20 meter dengan tinggi 6 meter itu untuk menyambut Tahun Baru Imlek.

Sekda Kota Serang Ultimatum ASN tak Terlibat Kasus Iming-iming Proyek

“Jangan lagi ada ASN mengiming-imingi proyek, Sekda aja tidak punya proyek satu pun. Mengiming-ngimingi jabatan, CPNS, PPPK, bulshit itu, tidak bisa, Saya aja Sekda tidak bisa menentukan itu,” kata Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin.

SERANG (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin memberikan ultimatum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak boleh mengiming-imingi proyek.

Nanang menegaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak boleh mengiming-imingi proyek. Hal tersebut diungkapkan buntut dari seorang pejabat ASN berinisial ZS (38) yang terlibat dugaan kasus penipuan pada proyek pengadaan laptop di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang.

“Saya sudah sering dalam apel menyampaikan, jangan lagi ASN mengiming-imingi proyek, Sekda aja tidak punya proyek satu pun. Mengiming-ngimingi jabatan, CPNS, PPPK, bulshit itu, tidak bisa. Sekda saja tidak bisa menentukan itu,” ujarnya, Kamis (1/2).

Nanang menuturkan, ZS yang pernah menduduki jabatan Sekretaris DLH Kota Serang itu saat ini sudah dinonaktifkan dari jabatan maupun ASN.

“Jadi Kepala BKPSDM sudah lapor ke saya, statusnya jadi tersangka begitu dan kita sudah non aktifkan. Tinggal nanti

kalaupun statusnya sudah tidak tersangka, ya kita aktifkan kembali,” katanya.

Menurutnya, ZS dapat dikembalikan statusnya sebagai ASN apabila statusnya tersebut sudah bebas dari tersangka.

“Karena kan hukum itu bisa dilakukan, ini kan delik aduan bukan delik absolut. Artinya dianggap kedua belah pihak dianggap perdamaian atau restorative justice, pencabutan sudah dilakukan. Apabila tersangkanya sudah dicabut oleh Polres, ya kita kembalikan lagi,” tuturnya.

Sebagai hukuman jera, ZS juga telah diturunkan jabatannya, dari eselon IIIA menjadi eselon IIIB, hingga diberhentikan sementara dari ASN.

“Namun demikian, yang bersangkutan itu sudah diturunkan jabatan dari eselon IIIA menjadi eselon IIIB, kemudian dinonaktifkan dulu,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kota Serang Karsono mengatakan, ZS sudah diberhentikan se-

mentara dari PNS. Pemberhentian ZS disebut sudah dilakukan sejak 11 Desember 2023 lalu, usai ZS sempat ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Desember 2023 lalu.

“Kalau sudah tersangka itu kita langsung berhenti sementara, sudah kita proses pertanggal 11 Desember 2023. Itu sudah diberhentikan sementara dari PNS, sambil menunggu proses yang bersangkutan di pengadilan,” ujar Karsono, Rabu (31/1).

Sebelum diberhentikan dari PNS, kata Karsono, ZS sempat diturunkan jabatan atau demosi eselon satu di bawahnya.

“Jadi sebelum menjadi tersangka itu ramekan, sudah kita turunkan jabatan dari sekretaris menjadi seorang kepala bidang, demosi eselon satu di bawahnya,” katanya.

Dijelaskan Karsono, pemberhentian sementara ZS tersebut berdasarkan surat yang didapatkan dari Polresta Serang Kota.

“Setelah proses berjalan

ditetapkan lah jadi tersangka, akhirnya berdasarkan surat dari Polresta Serang yang bersangkutan kita berhenti sementara dari jabatannya,” jelasnya.

Karsono mengaku, pemberhentian sementara ZS dari PNS itu akan terus berlanjut hingga adanya keputusan dari pengadilan.

“Diberhentikan sementara sebagai PNS sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kasus dugaan penipuan yang dialami oleh warga Bandung, Jawa Barat (Jabar) ini berawal saat ZS menjanjikan keuntungan dari proyek pengadaan laptop di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang.

Proyek yang dijanjikan tersebut bernilai Rp 1 miliar lebih. Untuk meyakinkan korban, ZS yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris DLH Kota Serang memperlihatkan 10 surat perintah kerja (SPK) yang diketahui fiktif. ● pra

Realisasi Investasi di Banten pada 2023 Capai Rp103,85 Triliun

SERANG (IM)- Realisasi investasi di Provinsi Banten pada tahun 2023 mencapai Rp103,85 triliun atau 173 persen di atas target 2023, sehingga Banten masuk pada urutan lima besar investasi nasional.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Banten 2023-2026 menargetkan Investasi sebesar Rp 60 triliun dan pemerintah pusat memberikan target investasi untuk Banten sebesar Rp 82,97 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti di Serang, Kamis (1/2), mengatakan, realisasi investasi sebesar itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,97 triliun atau 36,5 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp65,88 triliun atau 63,3 persen dengan total 42.384 proyek.

“Tenaga kerja Indonesia yang terserap selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 sebanyak 123.515 orang. Terjadi peningkatan sebesar 43,93 persen jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 54.266 orang,” kata Virgojanti.

Adapun capaian investasi itu berdasarkan urutan kabupaten/kota adalah terbesar dari Kota Cilegon Rp38,63 triliun, Kabupaten Tangerang Rp29,69 triliun, Kota Tangerang Rp14,99 triliun, Kabupaten Serang Rp10,29 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp7,45 triliun, Kabupaten Lebak Rp1,66 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp793 miliar,

dan Kota Serang sebesar Rp350 miliar.

“Realisasi investasi PMA paling besar masuk di Kota Cilegon Rp36,94 triliun, sedangkan untuk PMDN Kabupaten Tangerang sebesar Rp16,69 triliun,” katanya.

Virgojanti mengatakan ada lima sektor unggulan dengan capaian realisasi investasi terbesar baik PMA maupun PMDN yakni industri kimia dan farmasi sebesar Rp31,92 triliun, kemudian perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp18,49 triliun. Selain itu investasi sektor listrik, gas dan air Rp9,12 triliun. Lalu sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp7,23 triliun, serta jasa lainnya sebesar Rp6,57 triliun.

Sektor terbesar untuk PMA adalah industri kimia dan farmasi sebesar Rp30,11 triliun dengan 793 proyek, sedangkan sektor terbesar untuk PMDN yaitu perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp10,45 triliun dengan 1.767 proyek.

“Sedangkan lima negara sumber Investasi PMA yakni Malaysia 1.776 ribu dolar AS, Korea Selatan 709 ribu dolar AS, Singapura 671 ribu dolar AS, Jepang 416 ribu dolar AS, dan Hong Kong, China sebesar 273 ribu dolar AS,” katanya.

Berdasarkan Kementerian Investasi pada 24 Januari 2024 lima besar provinsi dengan investasi terbesar adalah Jawa Barat (Rp.210,6 triliun), DKI Jakarta (Rp166,7 triliun), Jawa Timur (Rp145,1 triliun), Sulawesi Tengah (Rp112 triliun), dan Banten (Rp103,85 triliun). ● pra

Warga Terdampak Pembangunan Waduk Karian Demo Tuntut Ganti Rugi

LEBAK (IM)- Ratusan warga Desa Tambak melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menuntut ganti rugi fasilitas sosial yang terdampak akibat pembangunan Waduk Karian.

“Mushala, masjid yang belum dibayarkan sudah dari 2014 (rencana pembangunan Waduk Karian) berarti 10 tahun molor. Kami di sini menuntut hak kami karena para pejabat sudah berjanji akan ada realisasi tapi kan ternyata tidak ada,” kata warga bernama Adang Boy kepada wartawan di lokasi, Kamis (1/2).

Warga menuntut ganti

rugi berupa masjid, musala, lahan kuburan, dan 180 bidang tanah warga yang belum dibayar. Adang mengatakan pemerintah sudah menjanjikan ganti rugi di bulan Januari tapi belum diterima warga hingga hari ini.

“Masjid, mushala, majelis ta’lim, 180 bidang tanah masyarakat yang belum dibayar, tanah kuburan. Kuburan orang tua kita sudah dipindahkan dan pemilik tanah menagih pembayaran lainnya. Kasian orang tua kita yang sudah dipindahkan (kuburan) tapi belum dibayar, kita pindahkan juga atas petunjuk dari pemerintah,” tuturnya.

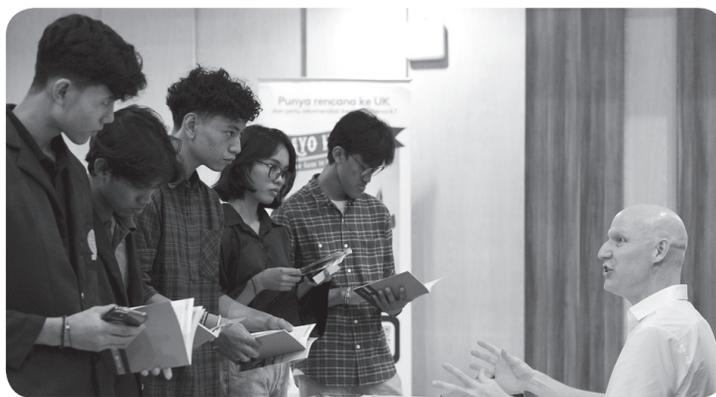
Adang menjelaskan warga meminta kepastian terkait ganti rugi yang su-

dah dijanjikan. Warga pun menolak pulang apabila tuntutan tidak diundahkan.

“Makanya kami mohon para pejabat tolonglah kami dibantu, karena apa? Karena kita bangun masjid, musala, majlis ta’lim dari pemborong, kami ibadah nggak nyaman,” jelasnya.

Sementara itu, Asda 1 pada Sekretaris Daerah Lebak, Alkadri, meminta warga untuk sabar. Ia akan memfasilitasi tuntutan warga agar bisa diselesaikan.

“Sabar, posisi kita sama akan memperjuangkan. Kita akan memfasilitasi keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita komunikasi lagi ke sana (pemerintah pusat),” kata Alkadri. ● pra



PAMERAN PENDIDIKAN INGGRIS DI BALI

Delegasi universitas asal Inggris memberikan informasi kepada pengunjung saat kegiatan UK Education Expo & Academic Networking di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (1/2). Pameran pendidikan itu menghadirkan perwakilan dari 25 universitas di Inggris yang menyediakan berbagai informasi bagi para calon mahasiswa asal Indonesia yang akan melanjutkan pendidikannya ke Inggris.



BULAN BAHASA BALI 2024

Pelajar menulis aksara Bali di atas daun lontar saat peringatan ke-6 Bulan Bahasa Bali tahun 2024 di Taman Budaya Bali, Denpasar, Bali, Kamis (1/2). Festival digelar hingga 2 Maret 2024.

Warga Kota Tangerang Diminta Jaga Lingkungan Guna Kendalikan Banjir

TANGERANG (IM)- Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin meminta masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar hasil pembangunan, seperti sistem pengendali banjir yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang, bisa berfungsi optimal dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Jaga saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi sumbatan dan menyebabkan banjir,” kata Nurdin di Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Ia mengatakan pembangunan sistem pengendali banjir sepanjang 115 meter di Kelurahan Uwung Jaya Cibodas jadi bagian mengurangi titik banjir dan genangan, mengingat lokasi tersebut kerap terjadi banjir akibat aliran air yang terhambat.

“Semoga nanti kalau turun hujan, airnya bisa lebih cepat mengalir jadi mencegah terjadinya genangan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemkot Tangerang juga akan terus mengevaluasi

efektivitas fungsi dari pembangunan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir dan genangan.

“Ke depan akan ditambah lagi penghijauan dan ruang terbuka hijau di sini, jadi bisa membantu penyerapan air waktu hujan,” ujar Nurdin.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono menambahkan Pemkot Tangerang saat ini memiliki 12 embung, enam situ, dan ratusan turap, serta drainase, yang disiapkan untuk mengantisipasi potensi terjadinya banjir di kota itu.

Lalu pembangunan infrastruktur sistem pengendali banjir tersebut, menurutnya, telah terbukti mampu menurunkan angka luas genangan sekitar 43 sampai 44 hektare setiap tahunnya.

“Pemkot Tangerang berharap berbagai infrastruktur tersebut dapat terus dioptimalkan untuk mengantisipasi potensi terjadinya banjir dalam jangka panjang di Kota Tangerang,” katanya. ● pp